

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang formulasi kebijakan Kartu Banyumas Sehat, teori Kingdon mampu memandu menjelaskan proses formulasi kebijakan tersebut. Beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

a. *Problem Stream*

Konsensus antar *policy maker* tentang agenda kebijakan akses kesehatan dapat dicapai atas dorongan faktor kajian rasional etika atau dalam istilah Kingdon yaitu indikator, peristiwa besar, dan umpan balik.

b. *Policy Stream*

Gagasan kebijakan Kartu Banyumas Sehat (KBS) diterima karena adanya pemakluman bersama dari parlemen di tingkat lokal. Jadi parlemen tingkat lokal memiliki pengaruh terhadap *policy stream*.

c. *Political Stream*

Opini publik dan perubahan pandangan pemerintah merupakan kekuatan yang secara terus menerus membentuk dan mendorong dibuatnya kebijakan jaminan kesehatan daerah atau Kartu Banyumas Sehat.

d. *Policy Window*

Bupati dan Wakil bupati terpilih adalah aktor yang berperan sebagai *policy entrepreneur*, dimana aktor tersebut mendorong arus politik lebih dominan untuk membuka jendela kebijakan (*policy window*).

- e. Secara teoritis dan empiris tidak terdapat arus yang simultan antara *problem*, *policy* dan *political stream*. Dalam penelitian ini, *political stream* memiliki arus paling kuat yang dapat mendorong kekuatan arus yang lain. Konsekuensinya *policy entrepreneur* terdorong untuk menggunakan *political stream* secara lebih dominan untuk membuka *policy window*. Sehingga hubungan antar *stream* tersebut tidak murni berjalan independen, karena arus politik memberikan pengaruh pada arus masalah dan kebijakan.

B. Implikasi

Penelitian ini memberikan implikasi secara teoritis dan praktis. Berikut berikut adalah beberapa uraiannya:

1. Implikasi Teoritis

Peneliti berharap perlu adanya pengkajian ulang oleh peneliti-peneliti selanjutnya terhadap model formulasi kebijakan yang telah disusun. Kondisi politik yang kuat berdampak pada berlakunya model tersebut. Artinya kondisi politik yang tidak terlalu kuat bisa berdampak pada tidak berlakunya model yang telah disusun. Oleh karena itu, untuk

menyempurnakan model tersebut diperlukan pengkajian model tersebut pada situasi formulasi kebijakan yang berbeda.

2. Implikasi Praktis

Berdasarkan penelitian ini, peneliti dapat menyusun beberapa rekomendasi bagi para *policy maker* terkait dengan proses formulasi yang syarat dengan berbagai kepentingan. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang telah disusun untuk mewujudkan formulasi kebijakan yang memenuhi nilai *public interest*:

- a. Membuka ruang-ruang diskusi untuk menampung gagasan dan kontrol dalam membahas permasalahan-permasalahan publik baik melalui seminar, diskusi publik, maupun *public hearing*.
- b. Membangun transparansi publik dalam setiap tahapan formulasi. Transparansi publik dapat dilakukan dalam beberapa bentuk seperti sidang terbuka, memberikan keterangan pers, ataupun bekerjasama dengan media masa untuk menginformasikan proses formulasi kebijakan. Sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memberikan umpan balik kepada para *policy maker*.
- c. Menempatkan peran akademisi dalam posisi yang strategis dalam setiap pengambilan kebijakan. Peran akademisi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk kajian ilmiah yang beretika. Dimana hasil kajian ini dijadikan sebagai salah satu ukuran bagi *policy maker* dalam pengambilan keputusan bukan sekedar formalitas belaka.